



**Judul** : OPTIMALKAN SISIR ANGGARAN: PENANGANAN WABAH COVID-19  
**Tanggal** : Kamis, 02 April 2020  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 8

Bisnis, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah menyiapkan solusi cepat, tepat, dan logis untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan pandemi virus corona agar keputusan pelebaran defisit anggaran lebih terukur. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa ruang peningkatan pendapatan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tengah wabah virus corona memang sangat terbatas. Upaya menggenjot penerimaan melalui penerimaan pajak diprediksi juga tidak efektif karena dalam 2 bulan—3 bulan terakhir, situasi dunia usaha tidak menentu karena pandemi COVID-19 menjagkiti hampir seluruh negara. “Saya melihat situasi saat ini dengan jumlah anggaran terbatas yang dimiliki negara saat ini justru akan dapat membuka potensi godaan berutang kepada luar negeri. Jangan sampai karena besaran utang membuat Indonesia tidak merdeka,” ujarnya. Dia menyarankan agar pemerintah menerbitkan instrumen surat utang yang bisa diakses oleh warga negara sendiri, ketimbang berutang ke negara lain “Tidak apa-apa negara ini berutang kepada mereka yang kaya di negeri ini, intinya dari dalam negeri sendiri. Mari dikumpulkan agar Indonesia dapat merdeka,” katanya Pada Selasa (31/3), Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Perpu itu pemerintah sudah memberikan garis besar optimalisasi anggaran guna mengatasi pandemi virus corona itu. (Lihat ilustrasi) Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Achmad Hafi sz Tohir menilai langkah pemerintah memperlebar defisit anggaran di APBN 2020 dari maksimal 3% menjadi 5,07% mestinya tidak perlu dilakukan apabila pos anggaran benar-benar disisir, seperti anggaran pemindahan ibu kota negara dan anggaran infrastruktur. “Anggaran pindah ibu kota dan infrastruktur yang besar sudah dioptimalisasi? Kalau sudah mestinya tidak perlu ada pelebaran defisit anggaran,” tuturnya. Pelebaran defisit bisa saja untukantisipasi keadaan yang lebih buruk dari perkiraan, sehingga Indonesia masih punya contingensi plan dengan adanya pelebaran defisit. “Sebagai mitra kerja di Komisi XI, saya memahami pelebaran ini. Artinya, jika memang sangat diperlukan, barulah opsi ini akan dikeluarkan oleh pemerintah, karena pelebaran defisit lebih kepada second line of defence,” katanya.